



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2023 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Sangatta, 26 Januari 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NOVIARI NOOR, ST., MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	I-1
PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	I-1
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	I-2
1.2.2 Data Pegawai	I-5
1.2.3 Anggaran	I-7
1.3 Dasar Hukum	I-7
1.4 Sistematis Laporan Kinerja	I-7
BAB II	II-1
PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	II-1
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023	II-3
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	II-3
BAB III	III-1
AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1 Capaian Kinerja	III-1
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	III-1
3.1.2 Membandingkan Antara Target dan realisasi tahun pelaporan	III-2
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	III-3
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi	III-4
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	III-5
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif alternatif solusi yang telah dilakukan	III-6
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya	III-11
3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan keberhasilan ataupun pencapaian pernyataan kinerja	III-13
3.2 Realisasi Anggaran	III-24



BAB IV	IV-1
PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN	LAMP-i



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Kutai Timur.....	I-6
Tabel 1.2	Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023	I-7
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	II-1
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023.....	II-2
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2023 Bappeda	II-3
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Bappeda.....	II-4
Tabel 2.5	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023	II-5
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja.....	III-2
Tabel 3.2	Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2023	III-2
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	III-3
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	III-4
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota.....	III-6
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	III-7
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	III-12
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	III-14
Tabel 3.9	Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	III-24
Tabel 3.10	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	III-36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi I-4

BAB I PENDAHULUAN





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi



kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 34 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- Menetapkan program, kegiatan, dan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah serta menyesuaikan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi;
- Mengendalikan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- Merencanakan bahan kebijakan pembangunan Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Mengkoordinasikan penyiapan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai bahan utama Musyawarah Perencanaan Pembangunan;



- Mengkoordinasikan penghimpunan dan penganalisisan hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing kepala PD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- Merencanakan penyusunan evaluasi rencana pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi Kepala PD;
- Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis penyelenggaraan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian Teknis Penyelenggaraan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian Teknis Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan;
- Melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan lingkup bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- Membina penyelenggaraan urusan kesekretariatan BAPPEDA;
- Membina kelompok jabatan fungsional;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
- Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan; dan
- Melakukan tugas lain diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Berikut bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Sumber : Perbup Nomor 34 Tahun 2023



1.2.2 Data Pegawai

Secara umum jumlah pegawai PNS, P3K dan TK2D di Bappeda Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2023 berjumlah 112 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 60 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 4 orang dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) sebanyak 48 orang. Gambaran komposisi Sumber Daya Aparatur menurut Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan secara rinci dapat dilihat dalam tabel 1.2 .



Tabel 1.1 Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Kutai Timur

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan ASN				Golongan PPPK		Pendidikan					
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	IX	VIII	S 2	S 1	D 3	SLTA	SLTP	SD
Kepala Badan	1		1						1					
Sekretaris	1		1						1					
Kepala Sub Bagian		2		2					2					
Kepala Bidang	4		3	1					3	1				
Perencana Ahli Muda	7	6	3	10					6	7				
Perencana Ahli Pertama	1	2		3						3				
Ahli Pertama – Pranata Komputer	1			1						1				
Jumlah ASN Pelaksana	15	20		32	2	1			3	27	1	3		1
Perencana Ahli Pertama (PPPK)	1	1						2		2				
Statistisi Ahli Pertama (PPPK)		1						1		1				
Terampil – Arsiparis (PPPK)		1									1			
Jumlah TK2D	20	26							1	32		13		
Total ASN+PPPK+TK2D	112 (PNS+PPPK+TK2D)		60 (PNS)				4 (PPPK)		112 (PNS+PPPK+TK2D)					

Sumber : Data Pegawai Bappeda Tahun 2023



1.2.3 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

Tabel 1.2 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	2022	Rp. 37.130.776.256,-
APBD	2023	Rp. 47.620.941.573,-

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kab. Kutai Timur Tahun 2022 dan Tahun 2023

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA





BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	84.55%	85.55%	86.55%	87.00%	90.00%	
		1.4.2.1	Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase capaian Evaluasi LKJIP	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%
		1.4.2.2	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	80.00%	87.00%	89.00%	91.00%	95.00%
		1.4.2.3	Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	83.55%	84.55%	85.55%	90.00%	95.00%

Sumber : Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Periode 2021 - 2026



Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPDP	prosentase	Keselarasan antara jumlah program dalam RKPDP dengan Jumlah program pada RPJMD tahun ke n	(Jumlah Program Dalam Dokumen RKPDP) : Jumlah Program Dalam Dokumen RPJMD) x 100%	Bappeda
1.4.2.1	Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah	1.4.2.1#0.1	Persentase capaian Evaluasi LKJIP	prosentase	Ketercapaian kegiatan yang terealisasi pada program penunjang urusan pemerintah daerah	(Jumlah Target yang terealisasi) : (Jumlah Target Kegiatan) x 10%	Bappeda
1.4.2.2	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	1.4.2.2#0.1	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	prosentase	Keselarasan antara jumlah program dalam RKPDP dengan Jumlah program pada RPJMD tahun ke n	(Jumlah Program Dalam Dokumen RKPDP) : (Jumlah Program Dalam Dokumen RPJMD) x 100%	Bappeda
1.4.2.3	Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	1.4.2.3#0.1	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	prosentase	Keselarasan antara jumlah program dalam Renstra dan Renja dengan Jumlah program pada RPJMD dan RKPDP tahun ke n	(Jumlah Program Dalam Dokumen Renstra dan Renja Seluruh PD Tahun n) : (Jumlah Program Dalam Dokumen RPJMD dan RKPDP Tahun n) x 100%	Bappeda

Sumber : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023



2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	prosentase	86.55	
		1.4.2.1	Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase capaian Evaluasi LKJIP	prosentase	85
		1.4.2.2	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	prosentase	89
		1.4.2.3	Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah		85.55

Sumber : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam



mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	86.55
1.4.2.1	Tercapainya Akuntabilitas Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase capaian Evaluasi LKjIP	85
1.4.2.2	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	89
1.4.2.3	Terpenuhinya Kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	85.55

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:



**Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2023**

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda	100 %	25,430,057,873
1.4.2.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Tersusun	100 %	765,000,000
1.4.2.1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	398,509,533
1.4.2.1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	50,000,000
1.4.2.1.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	43,783,759
1.4.2.1.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	50,669,042
1.4.2.1.1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	31,576,300
1.4.2.1.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	108,871,949



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
1.4.2.1.1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	81,589,417
1.4.2.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorer serta laporan Keuangan	100 %	14,565,057,873
1.4.2.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/Bulan	11,377,375,229
1.4.2.1.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,902,682,644
1.4.2.1.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	5000 Dokumen	935,000,000
1.4.2.1.1.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 Dokumen	100,000,000
1.4.2.1.1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	100,000,000
1.4.2.1.1.2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	672 Dokumen	50,000,000
1.4.2.1.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	4 Laporan	100,000,000



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		
1.4.2.1.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Pencatatan Aset Daerah yang dikelola oleh SKPD	100 %	79,000,000
1.4.2.1.1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	11,500,000
1.4.2.1.1.3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	67,500,000
1.4.2.1.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Jumlah Kebutuhan Pegawai SKPD	100 %	2,075,000,000
1.4.2.1.1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5 Paket	300,000,000
1.4.2.1.1.4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	25,000,000
1.4.2.1.1.4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	200,000,000
1.4.2.1.1.4.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	113 Orang	1,550,000,000
1.4.2.1.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100 %	3,249,500,000
1.4.2.1.1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	15 Paket	60,000,000



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.1.1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	544,500,000
1.4.2.1.1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	100,000,000
1.4.2.1.1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	350,000,000
1.4.2.1.1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	50,000,000
1.4.2.1.1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	2,045,000,000
1.4.2.1.1.5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	100,000,000
1.4.2.1.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Laporan Hasil Kegiatan	100 %	451,500,000
1.4.2.1.1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	85,000,000
1.4.2.1.1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	100,000,000
1.4.2.1.1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	266,500,000
1.4.2.1.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Laporan Hasil Kegiatan	100 %	4,245,000,000
1.4.2.1.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	52 Unit	500,000,000



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dandibayarkan Pajak dan Perizinannya		
1.4.2.1.1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	150,000,000
1.4.2.1.1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	3,595,000,000
1.4.2.2.1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100 %	10,750,000,000
1.4.2.2.1.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	2 Dokumen	5,278,911,615
1.4.2.2.1.1.1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	1,997,251,980
1.4.2.2.1.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Dokumen	181,342,000
1.4.2.2.1.1.3	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Berita Acara	88,697,839
1.4.2.2.1.1.4	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	54,980,954
1.4.2.2.1.1.5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	359,218,308
1.4.2.2.1.1.6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Usulan	178,150,800
1.4.2.2.1.1.7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	2,419,269,734



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)		
1.4.2.2.1.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terpenuhinya data dan informasi Pemerintahan Daerah dalam rangka penyusunan perencanaan daerah	56 OPD	1,685,691,137
1.4.2.2.1.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1,489,717,337
1.4.2.2.1.2.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	60 Orang	195,973,800
1.4.2.2.1.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah	5 Dokumen	1,196,732,262
1.4.2.2.1.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	305,701,862
1.4.2.2.1.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Lapooran	891,030,400
1.4.2.2.1.4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Implementasi SIPD pada penyusunan Perencanaan Daerah	56 OPD	2,588,664,986
1.4.2.2.1.4.1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang	1 Dokumen	200,000,000



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pembangunan Daerah yang Dikelola		
1.4.2.2.1.4.2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	386,052,986
1.4.2.2.1.4.3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2,002,612,000
1.4.2.3.1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD ke dalam Renstra dan Renja OPD	100 %	11,440,883,700
1.4.2.3.1.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pembangunan Manusia	100 %	2,195,000,000
1.4.2.3.1.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	120,900,000
1.4.2.3.1.1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	70,340,000
1.4.2.3.1.1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	28 Perangkat Daerah	89,250,000



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
1.4.2.3.1.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	115,170,000
1.4.2.3.1.1.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	1 Dokumen	871,150,000
1.4.2.3.1.1.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	12 Perangkat Daerah	278,790,000
1.4.2.3.1.1.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	12 Perangkat Daerah	311,000,000
1.4.2.3.1.1.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	338,400,000
1.4.2.3.1.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Perekonomian dan SDA	100 %	2,616,000,000



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.3.1.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	500,000,000
1.4.2.3.1.2.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	11 Perangkat Daerah	200,000,000
1.4.2.3.1.2.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	11 Perangkat Daerah	250,000,000
1.4.2.3.1.2.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	1,000,000,000
1.4.2.3.1.2.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	466,000,000
1.4.2.3.1.2.6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	200,000,000
1.4.2.3.1.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersusunnya Kegiatan Perencanaan OPD di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	6,629,883,700



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.3.1.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1,041,688,000
1.4.2.3.1.3.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Perangkat Daerah	319,527,000
1.4.2.3.1.3.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Perangkat Daerah	1,898,604,000
1.4.2.3.1.3.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	10 Laporan	299,723,000
1.4.2.3.1.3.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	331,713,750
1.4.2.3.1.3.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Perangkat Daerah	2,507,231,950



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.3.1.3.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Perangkat Daerah	133,420,000
1.4.2.3.1.3.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	97,976,000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	86.55	98.97	114.35%	Sangat Tinggi	Bappeda
1.4.2.1	Tercapainya Akuntabilitas Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase capaian Evaluasi LKJIP	85	100	117.65%	Sangat Tinggi	Bappeda
1.4.2.2	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja	89	98.97	111.20%	Sangat Tinggi	Bappeda



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Perencanaan Daerah	Perangkat Daerah					
1.4.2.3	Terpenuhinya Kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Perangkat Daerah	85.55	100	116.89%	Sangat Tinggi	Bappeda

Sumber : Pengukuran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

Berdasarkan data yang disajikan di atas capaian kinerja Bappeda semua melampaui target dan masuk kategori sangat tinggi, maka secara umum Bappeda Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang perencanaan pembangunan daerah secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda tahun 2021-2026

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun (N)		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	100%	86.55%	98.97%	114.35%



1.4.2.1	Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase capaian Evaluasi LKjIP	100%	85.00%	100%	117.65%
1.4.2.2	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	99.66%	89.00%	98.97%	111.20%
1.4.2.3	Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	100%	85.55	100%	116.89%

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	98.97	100	98.97%
1.4.2.1	Meningkatnya akuntabilitas penunjang	Persentase capaian Evaluasi LKjIP	100	100	100%



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	urusan pemerintahan daerah				
1.4.2.2	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	98.97	100	98.97%
1.4.2.3	Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	100	100	100%

Sumber : Pengukuran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.4 dapat dijelaskan bawah pada pelaksanaan tahun ke dua Rencana Startegis Bappeda dari tiga indikator kinerja yang telah memenuhi target kinerja Renstra adalah dua indikator kinerja yaitu Persentase capaian Evaluasi LKjIP dan Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah sedang satu indikator belum mencapai target kinerja pada Renstra meskipun secara capaian kinerja masuk dalam kategori sangat tinggi.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :



**Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/
Kabupaten/Kota**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	98.97	-	-
1.4.2.1	Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase capaian Evaluasi LKJIP	100	-	-
1.4.2.2	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	98.97	-	-
1.4.2.3	Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	100	-	-

Sumber : Pengukuran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, bahwa realisasi kinerja sasaran Bappeda tidak dapat disandingkan dengan standar nasional lainnya karena Bappeda merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintah tidak melakukan urusan wajib.

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	86.55	98.97	114.35%	Realisasi kinerja berhasil melampaui target	
1.4.2.1	Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase capaian Evaluasi LKjIP	85.00	100	117.65%	Realisasi kinerja berhasil melampaui target	
1.4.2.2	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	89.00	98.97	111.20%	Realisasi kinerja berhasil melampaui target	
1.4.2.3	Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	85.55	100	116.89%	Realisasi kinerja berhasil melampaui target	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel 3.6 dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator tujuan sasaran strategis Bappeda dalam kategori berhasil. Analisa penyebab keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja tujuan sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran I : Meningkatkan akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator persentase capaian evaluasi LKjIP. Kinerja sasaran tersebut menunjukkan berhasil yaitu dengan capaian 117.65%, beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan capaian kinerja adalah :

- Di internal Bappeda secara rutin diadakan rapat koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;



- Memberikan kesempatan kepada seluruh aparatur untuk meningkatkan kompetensinya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja Bappeda;
- Pengadministrasian dokumen-dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban keuangan dan pengadministrasian dokumen kepegawaian yang lebih tertata.

Sedangkan kendala yang dihadapi untuk pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator persentase capaian evaluasi LKjIP antara lain :

- Proses penetapan SK PA. Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran yang cukup lama;
- Barang yang akan diadakan tidak masuk kedalam RKBMD sehingga untuk pengadaan barang menunggu APBD perubahan.

Solusi yang ditempuh dengan tujuan untuk meningkatkan/ mempertahankan realisasi target dan perbaikan yang akan datang antara lain :

- Koordinasi ke bagian hukum untuk percepatan penetapan SK PA. Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran;
- Verifikasi pengusulan RKBMD secara berjenjang.

Sasaran II : Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah dengan indikator Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dengan definisi Keselarasan antara jumlah program dalam RKPD tahun 2023 dengan Jumlah program pada RPJMD tahun ke dua (2023). Pada tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi terlihat bahwa capaian kinerja Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah berhasil yaitu tercapai 111,20% dengan realisasi 98.97%. Faktor pendukung keberhasilan tersebut antara lain :

- Bappeda sebagai penanggung jawab penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk melaksanakan semua tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017;
- Setiap tahapan perencanaan dilaksanakan sesuai dengan timeline yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan;



- Menyiapkan kamus usulan masyarakat dan pikir sesuai dengan permasalahan dan prioritas pembangunan daerah;
- Melakukan inisiasi pendampingan pelaksanaan musrenbang kecamatan dengan memberikan pendampingan kepada desa secara intensif tata cara pengisian usulan musrenbang melalui aplikasi SIPD;
- Melakukan sosialisai kamus usulan dan prosedur usulan pikir di SIPD kepada DRPD;
- Pada saat penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKPD) diselaraskan dan disinkronkan dengan program yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD);
- Tahap perencanaan penganggaran menggunakan aplikasi SIPD;
- Tahap evaluasi menggunakan aplikasi evdoren;
- Koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat daerah, TAPD dan DPRD.

Sasaran III : Terpenuhiya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah dengan indikator Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah dengan definisi keselarasan antara jumlah program dalam Renstra dan Renja dengan Jumlah program dalam RPJMD dan RKPD. Pada tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi terlihat bahwa capaian kinerja Terpenuhiya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah tercapai sebesar 116.89% dengan realisasi 100%. Faktor pendukung keberhasilan tersebut adalah :

- Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah, memiliki tiga bidang sektoral yang menyelenggarakan fungsi koordinator penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Berkaitan dengan tugas dan fungsi tiga bidang sektoral di Bappeda melakukan pendampingan lebih intensif kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan. Pendampingan tahun 2023 yang telah dilakukan antara lain pendampingan penyusunan Renja tahun 2024 dan Perubahan Renja tahun 2023 dengan melakukan proses verifikasi. Pada proses verifikasi tiga bidang sektoral Bappeda memastikan sistematika penyajian dokumen perencanaan Perangkat Daerah telah sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;



- Penyelarasan atau sinkronisasi program-program dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah telah sesuai dengan Program-program dalam RKPD dan RPJMD melalui proses asistensi Perangkat Daerah dengan Bappeda sesuai dengan sektor Perangkat Daerah;
- Perangkat daerah didorong untuk segera menindak lanjuti hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan;
- Bappeda terus berupaya memberikan edukasi proses perencanaan kepada perangkat daerah, antara lain dengan menyusun schedule perencanaan, sosialisasi aplikasi SIPD, aparatur Bappeda siap memberikan pendampingan dan saran masukan kepada perangkat daerah.

Dalam mewujudkan terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah dan terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan terdapat beberapa hal yang menjadi kendala antara lain :

- Adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga Perangkat Daerah dengan pendampingan dari Bappeda melakukan pemetaan sub kegiatan yang lama dengan sub kegiatan nomenklatur terbaru pada saat proses penyusunan Renja 2024 sudah berjalan;
- Adanya pembentukan SOTK baru dan penggabungan SOTK sehingga dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam dokumen perencanaan PD;
- Data-data perencanaan Perangkat Daerah yang tidak konsisten/ kurang valid;
- Keterbatasan jumlah aparatur dibidang perencanaan baik di Bappeda maupun di PD;
- Regulasi perencanaan dari pemerintah pusat yang perubahannya cukup dinamis menuntut PD dan Bappeda untuk cepat memahami dan melaksanakan dalam tahapan perencanaan;
- Padatnya schedule pada setiap tahapan perencanaan;
- Belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran;



- Penggunaan SIPD tidak optimal karena tidak konsisten dalam mengeluarkan kebijakan sehingga implementasi di aplikasi SIPD tidak sesuai regulasi perencanaan;
- Perangkat daerah lambat menyerahkan dokumen untuk di asistensi oleh Bappeda.

Solusi yang ditempuh dengan tujuan untuk meningkatkan/ mempertahankan realisasi target antara lain :

- Perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang cukup dinamis dan timeline penyusunan dokumen perencanaan yang cukup padat diperlukan penguatan kompetensi verifikator di internal Bappeda agar dapat melakukan pendampingan dengan lebih maksimal dan memberikan rekomendasi yang lebih cepat dan valid;
- Peningkatan kompetensi aparatur di bidang perencanaan pada Perangkat Daerah sehingga perangkat daerah dapat dengan cepat merespon dan memahami penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah masing-masing;
- Peningkatan koordinasi di internal Bappeda untuk pendalaman dan menyamakan persepsi sebelum pelaksanaan asistensi atau verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah;
- Ekspose di internal Bappeda hasil asistensi atau verifikasi untuk dicermati bersama-sama;
- Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan perangkat daerah, peningkatan koordinasi dengan TAPD dan DPRD.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	86.55	98.97	114.35%	47.620.941.573	37.338.593.596	78,41	1.46
1.4.2.1	Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah	85.00	100	117.65%	25.430.057.873	21.205.519.342	83,39	1.41
1.4.2.2	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	89.00	98.97	111.20%	10.750.000.000	7.966.422.412	74,11	1.50
1.4.2.3	Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	85.55	100	116.89%	11.440.883.700	8.166.651.842	71,38	1.64

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kutai Timur

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara capaian kinerja dengan capaian anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang perencanaan Bappeda melakukan efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu :

1. Tujuan Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah capaian kinerja sebesar 114.35% dan capaian anggaran sebesar 78.41% efisiensi sebesar 1.46
2. Sasaran Meningkatkan akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah capaian kinerja sebesar 117.65% dan capaian anggaran sebesar 83.39 % efisiensi sebesar 1.41
3. Sasaran Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah capaian kinerja sebesar 111.20% dan capaian anggaran sebesar 74.11% efisiensi sebesar 1.50



4. Sasaran Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah capaian kinerja sebesar 116.89% dan capaian anggaran sebesar 71.38 % efisiensi sebesar 1.64

Secara keseluruhan untuk pencapaian target kinerja tujuan sasaran Bappeda telah melakukan efisiensi antara 1.41- 1.64.

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini :



Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.2	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPd	114.35					
1.4.2.1.1	Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase capaian Evaluasi LKjIP	117.65	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda	100%	Menunjang	
1.4.2.1.1.1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Tersusun	100%	Menunjang	
1.4.2.1.1.1.1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan karena Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Dengan Permendagri 86 Tahun 2017 dan Tahapan penyusunan perencanaan menggunakan aplikasi SIPD
1.4.2.1.1.1.2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan penyusunan RKA



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Hasil Koordinasi Peyusunan Dokumen RKA-SKPD			dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPD dan koofinasi intensif di internal Bappeda dan dengan BPKAD
1.4.2.1.1.1.3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan penyusunan Perubahan RKA dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPD dan koofinasi intensif di internal Bappeda dan dengan BPKAD
1.4.2.1.1.1.4				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan penyusunan RKA dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPD dan koofinasi intensif di internal Bappeda dan dengan BPKAD
1.4.2.1.1.1.5				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan penyusunan Perubahan RKA dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPD dan koofinasi intensif di internal Bappeda dan dengan BPKAD
1.4.2.1.1.1.6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan melakukan koordinasi dengan bidang-bidang diinternal Bappeda dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kiinerja SKPD			
1.4.2.1.1.1.7				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Evaluasi kinerja dilakukan secara rutin setiap triwulan dengan menggunakan aplikasi evdoren dan berkoordinasi dengan bidang-bidang diinternal Bappeda terkait kendala-kendala yang ada.
1.4.2.1.1.2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorer serta laporan Keuangan	100%	Menunjang	
1.4.2.1.1.2.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Gaji ASN dan tunjangan terbayarkan sesuai dengan regulasi.
1.4.2.1.1.2.2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan Gaji TK2D terbayarkan sesuai dengan regulasi
1.4.2.1.1.2.3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Bagian Keuangan melakukan koordinasi dengan bidang-bidang dan selalu memberikan himbauan agar tertib dalam administrasi
1.4.2.1.1.2.4				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan Melakukan konsultasi



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Pelaksanaan Akuntansi SKPD			dan koordinasi dengan pihak2 yang terkait dengan Akuntansi SKPD
1.4.2.1.1.2.5				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan upaya yang telah dilakukan adalah melakukan rekonsiliasi keuangan dengan BPKAD
1.4.2.1.1.2.6				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan, upaya yang telah dilakukan adalah mengarahkan kepada staf untuk tertib dalam penyimpanan arsip SPJ
1.4.2.1.1.2.7				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan dengan melakukan rekonsiliasi dengan BPKAD untuk realisasi semester 1 dan melakukan
1.4.2.1.1.3				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Pencatatan Aset Daerah yang dikelola oleh SKPD	100%	Menunjang	



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.2.1.1.3.1				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan . Dokumen RKBMMD tersusun sesuai dengan usulan-usualan dari bidang-bidang di Bappeda
1.4.2.1.1.3.2				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan dokumen penatausahaan BMD tersusun dan terus diupdate sesuai dengan kondisi existing BMD
1.4.2.1.1.4				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Jumlah Kebutuhan Pegawai SKPD	100%	Menunjang	
1.4.2.1.1.4.1				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pakaian dinas telah dibagikan kepada aparatur di Bappeda
1.4.2.1.1.4.2				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan, Pelayanan yang diberikana antara lain pengurusan Cuti, Pensiun, KGB, Kenaikan Pangkat, proses ASN untuk mengikuti uji kompetensi Fungsional perencanaan dan pelatihan, SKP
1.4.2.1.1.4.3				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelatihan telah di ikuti ASN di Bappeda sesuai dengan tupoksi. Pelatihan diselenggarakan oleh



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Pusbindiklatren Bappenas dan BPSDM Kemendagri
1.4.2.1.1.4.4				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Aparatur dibappeda telah mengikuti bimtek SKP, Sirkandi, arsiparis untuk meningkatkan kompetensi aparatur berkaitan dengan kepegawaian
1.4.2.1.1.5				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	Menunjang	
1.4.2.1.1.5.1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor terealisasi sesuai dengan yang direncanakan
1.4.2.1.1.5.2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor telah terlaksana sehingga dapat mendukung kinerja organisasi
1.4.2.1.1.5.3				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.4.2.1.1.5.4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.4.2.1.1.5.5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Barang cetak dan penggandaan digunakan untuk mendukung



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Penggandaan yang Disediakan			pelaksanaan tugas penyediaan barang cetak dan penggandaan serta administrasi perkantoran lainnya
1.4.2.1.1.5.6				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Rapat koordinasi untuk mendukung kinerja Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan
1.4.2.1.1.5.7				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pengarsipan dokumen-dokumen di Bappeda terus mengalami perbaikan-perbaikan
1.4.2.1.1.6				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Laporan Hasil Kegiatan	100%	Menunjang	
1.4.2.1.1.6.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Jika proses surat menyurat tidak dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi Bapperda memanfaatkan jasa surat menyurat
1.4.2.1.1.6.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan . penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik untuk mendukung kelancaran Bappeda menjalankan tugas dan fungsinya
1.4.2.1.1.6.3				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan . jasa pelayanan umum



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			kantor meliputi cleaning service, penjaga malam dan tukang taman
1.4.2.1.1.7				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Laporan Hasil Kegiatan	100%	Menunjang	
1.4.2.1.1.7.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pajak kendaraan dinas dan pemeliharaan sesuai dengan rencana sehingga kendaraan dinas dapat digunakan dengan optimal untuk mendukung pencapaian kinerja Bappeda
1.4.2.1.1.7.2				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sesuai dengan rencana sehingga peralatan dan mesin lainnya dapat digunakan dengan optimal untuk mendukung pencapaian kinerja Bappeda
1.4.2.1.1.7.3				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Rehab gedung dilakukan untuk bagian-bagian gedung yang mengalami kerusakan dengan tujuan untuk mendukung kinerja organisasi
1.4.2.2.1	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja	111.20	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	98.97%	Menunjang	



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Perencanaan Daerah	Perangkat Daerah						
1.4.2.2.1.1				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	100%	Menunjang	
1.4.2.2.1.1.1				Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan ketersediaan data pendukung untuk penyusunan dokumen-dokumen perencanaan .
1.4.2.2.1.1.2				Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan, forum perangkat daerah/ lintas SKPD telah dilaksanakan untuk penyusunan RKPD 2024
1.4.2.2.1.1.3				Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan
1.4.2.2.1.1.4				Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan untuk penyusunan dokumen RKPD dan RPJPD
1.4.2.2.1.1.5				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	100%	Menunjang	Musrenbang Kabupaten telah dilaksanakan untuk pembahasan RKPD 2024 dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								menentukan arah kebijakan pembangunan tahun 2024
1.4.2.2.1.1.6				Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	100%	Menunjang	Tahun 2023 telah dilakukan pendampingan kepada desa terkait usulan-usulan desa yang sesuai dengan kamus usulan dan permasalahan yang ada di setiap desa dan selanjutnya diinput dalam aplikasi SIPD
1.4.2.2.1.1.7				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJ MD/RKPD)	50.00%	Menunjang	Realisasi kinerja tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan terjadi kesalahan dalam menentukan target. Meskipun realisasi tidak mencapai target akan tetapi kinerja dari sub kegiatan ini telah dilaksanakan yaitu pengesahan dokumen RKPD 2024 dan Perubahan RKPD 2023.
1.4.2.2.1.2				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terpenuhinya data dan informasi Pemerintahan Daerah dalam rangka penyusunan perencanaan daerah	98.21%	Menunjang	
1.4.2.2.1.2.1				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dilakukannya penyampaian kebutuhan data dan rekon data-data pendukung perencanaan pembangunan



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.2.2.1.2.2				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan telah dilaksanakan pembinaan terhadap aparatur perencana di PD untuk memndukung peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan
1.4.2.2.1.3				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang	
1.4.2.2.1.3.1				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan.
1.4.2.2.1.3.2				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Monitoring evaluasi pelaksanaan Renja PD dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Evdoren
1.4.2.2.1.4				Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Implementasi SIPD pada penyusunan Perencanaan Daerah	98.21%	Menunjang	
1.4.2.2.1.4.1				Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola			
1.4.2.2.1.4.2				Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada tahap perencanaan dan penganggaran telah menggunakan aplikasi SIPD
1.4.2.2.1.4.3				Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pembinaan kepada perangkat daerah terkait SIPD telah dilakukan dengan tujuan meningkatkan kompetensi aparatur perencanaan di PD
1.4.2.3.1	Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	116.89	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPd ke dalam Renstra dan Renja OPD	100%	Menunjang	
1.4.2.3.1.1				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pembangunan Manusia	97.65%	Menunjang	



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.2.3.1.1.1				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pendampingan dan koordinasi dengan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang Pemerintahan telah dilaksanakan dalam penyusunan RKPD, Perubahan RKPD dan RPJPD.
1.4.2.3.1.1.2				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	96.43%	Menunjang	Realisasi target tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan dikarenakan adanya SOTK Baru (penggabungan SOTK) dari 28 menjadi 27. Akan tetapi pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang pemerintahan telah dilaksanakan untuk semua PD
1.4.2.3.1.1.3				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	96.43%	Menunjang	Realisasi target tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan dikarenakan adanya SOTK Baru (penggabungan SOTK) dari 28 menjadi 27. Akan tetapi pelaksanaan pendampingan, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang pemerintahan telah dilaksanakan untuk semua PD
1.4.2.3.1.1.4				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Telah dilaksanakan sinkronisasi antar dokumen perencanaan PD



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan			dibawah bidang Pemerintahan dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah, provinsi dan pusat
1.4.2.3.1.1.5				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pendampingan dan koordinasi dengan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang Pembangunan Manusia telah dilaksanakan dalam penyusunan RKPD, Perubahan RKPD dan RPJPD.
1.4.2.3.1.1.6				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang Pembangunan Manusia telah dilaksanakan
1.4.2.3.1.1.7				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan pendampingan, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang Pembangunan Manusia telah dilaksanakan



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.2.3.1.1.8				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Telah dilaksanakan sinkronisasi antar dokumen perencanaan PD dibawah bidang Pembangunan Manusia dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah, provinsi dan pusat
1.4.2.3.1.2				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Perekonomian dan SDA	100%	Menunjang	
1.4.2.3.1.2.1				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pendampingan dan koordinasi dengan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang Perekonomian telah dilaksanakan dalam penyusunan RKPD, Perubahan RKPD dan RPJPD.
1.4.2.3.1.2.2				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang Perekonomian telah dilaksanakan
1.4.2.3.1.2.3				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Jumlah Perangkat Daerah yang	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian			pendampingan, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang Perekonomian telah dilaksanakan
1.4.2.3.1.2.4				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Telah dilaksanakan sinkronisasi antar dokumen perencanaan PD dibawah bidang Perekonomian dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah, provinsi dan pusat
1.4.2.3.1.2.5				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pendampingan dan koordinasi dengan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang SDA telah dilaksanakan dalam penyusunan RKPD, Perubahan RKPD dan RPJPD
1.4.2.3.1.2.6				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Telah dilaksanakan sinkronisasi antar dokumen perencanaan PD dibawah bidang SDA dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah, provinsi dan pusat



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.2.3.1.3				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersusunnya Kegiatan Perencanaan OPD di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	Menunjang	
1.4.2.3.1.3.1				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pendampingan dan koordinasi dengan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang Infrastuktur telah dilaksanakan dalam penyusunan RKPD, Perubahan RKPD dan RPJPD.
1.4.2.3.1.3.2				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang Infrastuktur telah dilaksanakan
1.4.2.3.1.3.3				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan pendampingan, monitoring dan evaluasi peyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang Infrastuktur telah dilaksanakan



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.2.3.1.3.4				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Telah dilaksanakan sinkronisasi antar dokumen perencanaan PD dibawah bidang Infrastuktur dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah, provinsi dan pusat
1.4.2.3.1.3.5				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pendampingan dan koordinasi dengan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang kewilayahan telah dilaksanakan dalam penyusunan RKPD, Perubahan RKPD dan RPJPD.
1.4.2.3.1.3.6				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang kewilayahan telah dilaksanakan
1.4.2.3.1.3.7				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pelaksanaan pendampingan, monitoring dan evaluasi peyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang kewilayahan telah dilaksanakan



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjan/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			
1.4.2.3.1.3.8				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	100%	Menunjang	Realisasi target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Telah dilaksanakan sinkronisasi antar dokumen perencanaan PD dibawah bidang kewilayahan dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah, provinsi dan pusat

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kutai Timur



Berdasarkan dari hasil tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan dapat disimpulkan bahwa :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Keberhasilan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan pelaksanaan tujuh kegiatan dan 33 sub kegiatan. Secara keseluruhan capaian kinerja pada kegiatan dan sub kegiatan mencapai 100%. Faktor – Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

- Di internal Bappeda secara rutin diadakan rapat koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- Pengadministrasian dokumen-dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban yang rapi berdampak pada kemudahan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Sedangkan faktor penghambat atau kendala yang dihadapi untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

- Proses penetapan SK PA. Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran yang cukup lama;
- Barang yang akan diadakan tidak masuk kedalam RKBMD sehingga untuk pengadaan barang menunggu APBD perubahan.

Solusi yang ditempuh untuk mempertahankan capaian target kinerja/perbaikan kedepan antara lain :

- Koordinasi ke bagian hukum untuk percepatan penetapan SK PA. Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran;
- Verifikasi pengusulan RKBMD secara berjenjang.

2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Terdiri atas 4 kegiatan dan 14 sub kegiatan. Capaian kinerja program ini



belum mencapai 100% atau capaian program sebesar 98.96% dikarenakan terdapat program yang ada dalam RPJMD tetapi dalam RKPD tidak dijalankan sehingga berpengaruh terhadap capaian program, akan tetapi capaian program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah tetap masuk dalam kategori sangat tinggi. Faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah antara lain :

- Bappeda sebagai penanggung jawab penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk melaksanakan semua tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017;
- Setiap tahapan perencanaan dilaksanakan sesuai dengan timeline yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan;
- Menyiapkan kamus usulan masyarakat dan pikir sesuai dengan permasalahan dan prioritas pembangunan daerah;
- Melakukan inisiasi pendampingan pelaksanaan musrenbang kecamatan dengan memberikan pendampingan kepada desa secara intensif tata cara pengisian usulan musrenbang melalui aplikasi SIPD;
- Melakukan sosialisai kamus usulan dan prosedur usulan pikir di SIPD kepada DRPD;
- Pada saat penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKPD) diselaraskan dan disinkronkan dengan program yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD);
- Tahap perencanaan penganggaran menggunakan aplikasi SIPD;
- Tahap evaluasi menggunakan aplikasi evdoren;
- Koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat daerah, TAPD dan DPRD.

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Capaian target Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 100% didukung dengan pelaksanaan 3 kegiatan dan 22 sub kegiatan, adapun faktor-faktor yang mendorong ketercapaian target Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :



- Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah, memiliki tiga bidang sektoral yang menyelenggarakan fungsi koordinator penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Berkaitan dengan tugas dan fungsi tiga bidang sektoral di Bappeda melakukan pendampingan lebih intensif kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan. Pendampingan tahun 2023 yang telah dilakukan antara lain pendampingan penyusunan Renja tahun 2024 dan Perubahan Renja tahun 2023 dengan melakukan proses verifikasi. Pada proses verifikasi tiga bidang sektoral Bappeda memastikan sistematika penyajian dokumen perencanaan Perangkat Daerah telah sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
- Penyelarasan atau sinkronisasi program-program dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah telah sesuai dengan Program-program dalam RKPD dan RPJMD melalui proses asistensi Perangkat Daerah dengan Bappeda sesuai dengan sektor Perangkat Daerah;
- Perangkat daerah didorong untuk segera menindak lanjuti hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan;
- Bappeda terus berupaya memberikan edukasi proses perencanaan kepada perangkat daerah, antara lain dengan menyusun schedule perencanaan, sosialisasi aplikasi SIPD, aparatur Bappeda siap memberikan pendampingan dan saran masukan kepada perangkat daerah.

Selain faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat beberapa kendala antara lain :

- Adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga Perangkat Daerah dengan pendampingan dari Bappeda melakukan pemetaan sub kegiatan yang lama



dengan sub kegiatan nomenklatur terbaru pada saat proses penyusunan Renja 2024 sudah berjalan;

- Adanya pembentukan SOTK baru dan penggabungan SOTK sehingga dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam dokumen perencanaan PD;
- Data-data perencanaan Perangkat Daerah yang tidak konsisten/ kurang valid;
- Keterbatasan jumlah aparatur dibidang perencanaan baik di Bappeda maupun di PD;
- Regulasi perencanaan dari pemerintah pusat yang perubahannya cukup dinamis menuntut PD dan Bappeda untuk cepat memahami dan melaksanakan dalam tahapan perencanaan;
- Padatnya schedule pada setiap tahapan perencanaan;
- Belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran;
- Penggunaan SIPD tidak optimal karena tidak konsisten dalam mengeluarkan kebijakan sehingga implementasi di aplikasi SIPD tidak sesuai regulasi perencanaan;
- Perangkat daerah lambat menyerahkan dokumen untuk diasistensi oleh Bappeda.

Solusi yang ditempuh dengan tujuan untuk meningkatkan/ mempertahankan realisasi target antara lain :

- Perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang cukup dinamis dan timeline penyusunan dokumen perencanaan yang cukup padat diperlukan penguatan kompetensi verifikator di internal Bappeda agar dapat melakukan pendampingan dengan lebih maksimal dan memberikan rekomendasi yang lebih cepat dan valid;
- Peningkatan kompetensi aparatur di bidang perencanaan pada Perangkat Daerah sehingga perangkat daerah dapat dengan cepat merespon dan memahami penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah masing-masing;
- Peningkatan koordinasi di internal Bappeda untuk pendalaman dan menyamakan persepsi sebelum pelaksanaan asistensi atau verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah;



- Ekspose di internal Bappeda hasil asistensi atau verifikasi untuk dicermati bersama- sama;
- Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan perangkat daerah, TAPD dan DPRD

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.430.057.873	21.205.519.342	83,39
1.4.2.1.1.1	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	765.000.000	588.773.907	76,96
1.4.2.1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	398.509.533	306.555.440	76,93
1.4.2.1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50.000.000	38.514.600	77,03
1.4.2.1.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	43.783.759	31.769.250	72,56
1.4.2.1.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50.669.042	43.180.201	85,22
1.4.2.1.1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	31.576.300	24.772.600	78,45



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.1.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	108.871.949	82.815.100	76,07
1.4.2.1.1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.589.417	61.166.716	74,97
1.4.2.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.565.057.873	12.480.724.854	85,69
1.4.2.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.377.375.229	9.866.016.676	86,72
1.4.2.1.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.902.682.644	1.606.252.194	84,42
1.4.2.1.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	935.000.000	729.012.785	77,97
1.4.2.1.1.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100.000.000	78.548.701	78,55
1.4.2.1.1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.000.000	84.020.318	84,02
1.4.2.1.1.2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	50.000.000	36.000.850	72,00
1.4.2.1.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100.000.000	80.873.330	80,87
1.4.2.1.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	79.000.000	74.884.800	94,79



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.1.1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	11.500.000	7.507.200	65,28
1.4.2.1.1.3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	67.500.000	67.377.600	99,82
1.4.2.1.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.075.000.000	1.844.781.524	88,91
1.4.2.1.1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	300.000.000	249.375.400	83,13
1.4.2.1.1.4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.000.000	3.234.600	12,94
1.4.2.1.1.4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000	145.283.881	72,64
1.4.2.1.1.4.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.550.000.000	1.446.887.643	93,35
1.4.2.1.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.249.500.000	1.960.249.217	60,32
1.4.2.1.1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000	36.024.600	60,04
1.4.2.1.1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	544.500.000	481.202.700	88,38
1.4.2.1.1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.000.000	83.660.000	83,66
1.4.2.1.1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	350.000.000	322.643.965	92,18



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.1.1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	28.386.600	56,77
1.4.2.1.1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.045.000.000	921.796.752	45,08
1.4.2.1.1.5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000	86.534.600	86,53
1.4.2.1.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	451.500.000	412.627.100	91,39
1.4.2.1.1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85.000.000	84.490.600	99,40
1.4.2.1.1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	75.431.700	75,43
1.4.2.1.1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	266.500.000	252.704.800	94,82
1.4.2.1.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.245.000.000	3.843.477.940	90,54
1.4.2.1.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.000.000	344.361.140	68,87
1.4.2.1.1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000	97.924.800	65,28
1.4.2.1.1.7.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.595.000.000	3.401.192.000	94,61



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.2.1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	10.750.000.000	7.966.422.412	74,11
1.4.2.2.1.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	L5.278.911.615	3.672.460.013	69,57
1.4.2.2.1.1.1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1.997.251.980	1.336.518.419	66,92
1.4.2.2.1.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	54.980.954	52.996.500	96,39
1.4.2.2.1.1.3	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	181.342.000	123.213.500	67,95
1.4.2.2.1.1.4	Pelaksanaan Konsultasi Publik	88.697.839	66.406.753	74,87
1.4.2.2.1.1.5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	359.218.308	290.081.134	80,75
1.4.2.2.1.1.6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	178.150.800	118.699.800	66,63
1.4.2.2.1.1.7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2.419.269.734	1.684.543.907	69,63



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.2.1.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.685.691.137	1.457.854.866	86,48
1.4.2.2.1.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.489.717.337	1.313.115.655	88,15
1.4.2.2.1.2.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	195.973.800	144.739.211	73,86
1.4.2.2.1.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.196.732.262	814.212.116	68,04
1.4.2.2.1.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	305.701.862	245.313.193	80,25
1.4.2.2.1.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	891.030.400	568.898.923	63,85
1.4.2.2.1.4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2.588.664.986	2.021.895.417	78,11
1.4.2.2.1.4.1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	200.000.000	140.318.970	70,16



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.2.1.4.2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	386.052.986	283.561.469	73,45
1.4.2.2.1.4.3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2.002.612.000	1.598.014.978	79,80
1.4.2.3.1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.440.883.700	8.166.651.842	71,38
1.4.2.3.1.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2.195.000.000	1.522.059.544	69,34
1.4.2.3.1.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	120.900.000	101.871.469	84,26
1.4.2.3.1.1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	70.340.000	39.058.560	55,53
1.4.2.3.1.1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	89.250.000	29.722.600	33,30



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
1.4.2.3.1.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	115.170.000	60.604.350	52,62
1.4.2.3.1.1.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	871.150.000	667.055.200	76,57
1.4.2.3.1.1.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	278.790.000	165.604.865	59,40
1.4.2.3.1.1.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	311.000.000	229.442.100	73,78
1.4.2.3.1.1.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	338.400.000	228.700.400	67,58



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.2.3.1.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2.616.000.000	1.873.572.586	71,62
1.4.2.3.1.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	500.000.000	360.654.821	72,13
1.4.2.3.1.2.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	200.000.000	140.542.905	70,27
1.4.2.3.1.2.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	250.000.000	210.847.150	84,34
1.4.2.3.1.2.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1.000.000.000	717.593.010	71,76
1.4.2.3.1.2.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	466.000.000	302.702.450	64,96
1.4.2.3.1.2.6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	200.000.000	141.232.250	70,62



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			
1.4.2.3.1.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	6.629.883.700	4.771.019.712	71,96
1.4.2.3.1.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.041.688.000	806.468.454	77,42
1.4.2.3.1.3.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	319.527.000	176.507.429	55,24
1.4.2.3.1.3.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1.898.604.000	1.504.037.148	79,22
1.4.2.3.1.3.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	299.723.000	157.539.731	52,56
1.4.2.3.1.3.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	331.713.750	196.179.911	59,14



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(RPJPD, RPJMD dan RKPDP)			
1.4.2.3.1.3.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2.507.231.950	1.754.834.449	69,99
1.4.2.3.1.3.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	133.420.000	104.340.880	78,20
1.4.2.3.1.3.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	97.976.000	71.111.710	72,58

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

Tahun Anggaran 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang perencanaan didukung dengan pelaksanaan 3 Program 14 Kegiatan dan 69 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 47,620,941,573 (Empat Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 37,338,593,596 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Riga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) Sisa anggaran sebesar Rp. 10,282,347,977,- (Sepuluh Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu



Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) atau realisasi anggaran sebesar 78.41%. Adapun penyebab anggaran tidak dapat 100% terealisasi adalah :

- Anggaran belanja perjalanan dinas yang tidak dapat direalisasikan karena merupakan sisa dari pagu anggaran tiket pesawat dan penginapan/hotel sebesar kurang lebih Rp. 4,497,735,798 (Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Depalan Rupiah);
- Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN karena rapelan tunjangan pejabat fungsional yang disetarakan belum dapat direalisasikan disebabkan dokumen pendukung belum lengkap (SK pembayaran rapelan tunjangan pejabat fungsional yang dikeluarkan oleh BKPSDM belum ada)
- Anggaran belanja jasa tenaga ahli dibayarkan sesuai dengan jumlah bulan tenaga ahli bekerja;
- Anggaran belanja sewa alat angkut kendaraan bermotor terdapat sisa anggaran dikarenakan menyesuaikan dengan jumlah hari perjalanan dinas tenaga ahli;
- Anggaran Belanja sewa peralatan studio pemetaan/peralatan ukur terdapat sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan karena penyesuaian jumlah drone yang disewa;
- Anggaran Belanja sewa komputer untuk pekerjaan pemetaan yang dilaksanakan oleh pihak ke 3 terdapat sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan karena penyesuaian jumlah hari sewa komputer untuk pemetaan;
- Sisa Anggaran belanja ATK, belanja cetak, makan minum rapat, honor narasumber karena sesuai dengan kebutuhan.

Solusi untuk perbaikan kedepan antara lain :

- Dalam tahapan perencanaan penganggaran Kepala Bidang di Bappeda menyampaikan rencana aksi, target kinerja dan kebutuhan anggaran yang dilengkapi dengan identifikasi pengadaan barang/jasa, menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa dan penyusunan kerangka acuan kerja sub kegiatan yang dipresentasikan/ disampaikan kepada Kepala Bappeda;
- Lebih intensif melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi realisasi keuangan;



- Pada saat melakukan perubahan Rencana Kerja (Renja) perlu dilakukan analisis lebih komperhensif terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja sebagai dasar untuk pengurangan atau penambahan pagu anggaran perubahan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kutai Timur	86,55 %	98,97	114.35%	47.620.941.573	37.338.593.596	78,41%	1,46
1.4.2.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur	100 %	100	100%	25.430.057.873	21.205.519.342	83,39%	1,20
1.4.2.1.1.1	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100	100%	765.000.000	588.773.907	76,96%	1,30
1.4.2.1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2	100%	398.509.533	306.555.440	76,93%	1,30
1.4.2.1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	1	100%	50.000.000	38.514.600	77,03%	1,30
1.4.2.1.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	1	100%	43.783.759	31.769.250	72,56%	1,38



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Perubahan RKA-SKPD							
1.4.2.1.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1	100%	50.669.042	43.180.201	85,22%	1,17
1.4.2.1.1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1	100%	31.576.300	24.772.600	78,45%	1,27
1.4.2.1.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1	100%	108.871.949	82.815.100	76,07%	1,31
1.4.2.1.1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1	100%	81.589.417	61.166.716	74,97%	1,33
1.4.2.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100	100%	14.565.057.873	12.480.724.854	85,69%	1,17
1.4.2.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/Bulan	64	100%	11.377.375.229	9.866.016.676	86,72%	1,15
1.4.2.1.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1	100%	1.902.682.644	1.606.252.194	84,42%	1,18
1.4.2.1.1.2.3	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	5000 Dokumen	5000	100%	935.000.000	729.012.785	77,97%	1,28
1.4.2.1.1.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 Dokumen	6	100%	100.000.000	78.548.701	78,55%	1,27
1.4.2.1.1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5	100%	100.000.000	84.020.318	84,02%	1,19
1.4.2.1.1.2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan	672 Dokumen	672	100%	50.000.000	36.000.850	72,00%	1,39



No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Tanggapan Pemeriksaan							
1.4.2.1.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD	4 Laporan	4	100%	100.000.000	80.873.330	80,87%	1,24
1.4.2.1.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	100	100%	79.000.000	74.884.800	94,79%	1,05
1.4.2.1.1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1	100%	11.500.000	7.507.200	65,28%	1,53
1.4.2.1.1.3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4	100%	67.500.000	67.377.600	99,82%	1,00
1.4.2.1.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100	100%	2.075.000.000	1.844.781.524	88,91%	1,12
1.4.2.1.1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5 Paket	5	100%	300.000.000	249.375.400	83,13%	1,20
1.4.2.1.1.4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	5	100%	25.000.000	3.234.600	12,94%	7,73
1.4.2.1.1.4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 Orang	20	100%	200.000.000	145.283.881	72,64%	1,38
1.4.2.1.1.4.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	113 Orang	113	100%	1.550.000.000	1.446.887.643	93,35%	1,07
1.4.2.1.1.5	Administrasi Umum	100 %	100	100%	3.249.500.000	1.960.249.217	60,32%	1,66



No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Perangkat Daerah							
1.4.2.1.1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 Paket	15	100%	60.000.000	36.024.600	60,04%	1,67
1.4.2.1.1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12	100%	544.500.000	481.202.700	88,38%	1,13
1.4.2.1.1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 Paket	3	100%	100.000.000	83.660.000	83,66%	1,20
1.4.2.1.1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25 Paket	25	100%	350.000.000	322.643.965	92,18%	1,08
1.4.2.1.1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	3	100%	50.000.000	28.386.600	56,77%	1,76
1.4.2.1.1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50	100%	2.045.000.000	921.796.752	45,08%	2,22
1.4.2.1.1.5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1	100%	100.000.000	86.534.600	86,53%	1,16
1.4.2.1.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100	100%	451.500.000	412.627.100	91,39%	1,09
1.4.2.1.1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	5	100%	85.000.000	84.490.600	99,40%	1,01
1.4.2.1.1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6 Laporan	6	100%	100.000.000	75.431.700	75,43%	1,33
1.4.2.1.1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	4	100%	266.500.000	252.704.800	94,82%	1,05
1.4.2.1.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100	100%	4.245.000.000	3.843.477.940	90,54%	1,10



No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1.4.2.1.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52 Unit	52	100%	500.000.000	344.361.140	68,87%	1,45
1.4.2.1.1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Unit	7	100%	150.000.000	97.924.800	65,28%	1,53
1.4.2.1.1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	4	100%	3.595.000.000	3.401.192.000	94,61%	1,06
1.4.2.2.1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	98,97	98.97%	10.750.000.000	7.966.422.412	74,11%	1,34
1.4.2.2.1.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2 Dokumen	2	100%	5.278.911.615	3.672.460.013	69,57%	1,44
1.4.2.2.1.1.1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2	100%	1.997.251.980	1.336.518.419	66,92%	1,49
1.4.2.2.1.1.2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1 Dokumen	1	100%	181.342.000	123.213.500	67,95%	1,47
1.4.2.2.1.1.3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1	100%	88.697.839	66.406.753	74,87%	1,34



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.4.2.2.1.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	1 Berita Acara	1	100%	54.980.954	52.996.500	96,39%	1,04
1.4.2.2.1.1.5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1	100%	359.218.308	290.081.134	80,75%	1,24
1.4.2.2.1.1.6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	1 Usulan	1	100%	178.150.800	118.699.800	66,63%	1,50
1.4.2.2.1.1.7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	2	50%	2.419.269.734	1.684.543.907	69,63%	0,72
1.4.2.2.1.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	56 OPD	55	98,21%	1.685.691.137	1.457.854.866	86,48%	1,14
1.4.2.2.1.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1	100%	1.489.717.337	1.313.115.655	88,15%	1,13
1.4.2.2.1.2.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	60 Orang	60	100%	195.973.800	144.739.211	73,86%	1,35
1.4.2.2.1.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Dokumen	5	100%	1.196.732.262	814.212.116	68,04%	1,47
1.4.2.2.1.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	4	100%	305.701.862	245.313.193	80,25%	1,25



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian		
	Daerah di Kabupaten / Kota								
1.4.2.2.1.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2	Lapooran	2	100%	891.030.400	568.898.923	63,85%	1,57
1.4.2.2.1.4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	56	OPD	55	98,21%	2.588.664.986	2.021.895.417	78,11%	1,26
1.4.2.2.1.4.1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1	Dokumen	1	100%	200.000.000	140.318.970	70,16%	1,43
1.4.2.2.1.4.2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1	Dokumen	1	100%	386.052.986	283.561.469	73,45%	1,36
1.4.2.2.1.4.3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah	1	Dokumen	1	100%	2.002.612.000	1.598.014.978	79,80%	1,25
1.4.2.3.1	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	100	100%	11.440.883.700	8.166.651.842	71,38%	1,40
1.4.2.3.1.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan	100	%	97,65	97,65%	2.195.000.000	1.522.059.544	69,34%	1,41



No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Pembangunan Manusia							
1.4.2.3.1.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD), RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1	100%	120.900.000	101.871.469	84,26%	1,19
1.4.2.3.1.1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	28 Perangkat Daerah	27	96,43%	70.340.000	39.058.560	55,53%	1,74
1.4.2.3.1.1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	28 Perangkat Daerah	27	96,43%	89.250.000	29.722.600	33,30%	2,90
1.4.2.3.1.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1	100%	115.170.000	60.604.350	52,62%	1,90
1.4.2.3.1.1.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1	100%	871.150.000	667.055.200	76,57%	1,31
1.4.2.3.1.1.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	12 Perangkat Daerah	12	100%	278.790.000	165.604.865	59,40%	1,68



No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia							
1.4.2.3.1.1.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12 Perangkat Daerah	12	100%	311.000.000	229.442.100	73,78%	1,36
1.4.2.3.1.1.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2	100%	338.400.000	228.700.400	67,58%	1,48
1.4.2.3.1.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	100	100%	2.616.000.000	1.873.572.586	71,62%	1,40
1.4.2.3.1.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1	100%	500.000.000	360.654.821	72,13%	1,39
1.4.2.3.1.2.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	11 Perangkat Daerah	11	100%	200.000.000	140.542.905	70,27%	1,42
1.4.2.3.1.2.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	11 Perangkat Daerah	11	100%	250.000.000	210.847.150	84,34%	1,19



No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian							
1.4.2.3.1.2.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	2	100%	1.000.000.000	717.593.010	71,76%	1,39
1.4.2.3.1.2.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1	100%	466.000.000	302.702.450	64,96%	1,54
1.4.2.3.1.2.6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1	100%	200.000.000	141.232.250	70,62%	1,42
1.4.2.3.1.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100	100%	6.629.883.700	4.771.019.712	71,96%	1,39
1.4.2.3.1.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1	100%	1.041.688.000	806.468.454	77,42%	1,29
1.4.2.3.1.3.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	5 Perangkat Daerah	5	100%	319.527.000	176.507.429	55,24%	1,81



No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Daerah Bidang Infrastruktur							
1.4.2.3.1.3.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Perangkat Daerah	5	100%	1.898.604.000	1.504.037.148	79,22%	1,26
1.4.2.3.1.3.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	10 Laporan	10	100%	299.723.000	157.539.731	52,56%	1,90
1.4.2.3.1.3.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	1 Dokumen	1	100%	331.713.750	196.179.911	59,14%	1,69
1.4.2.3.1.3.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Perangkat Daerah	1	100%	2.507.231.950	1.754.834.449	69,99%	1,43
1.4.2.3.1.3.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Perangkat Daerah	1	100%	133.420.000	104.340.880	78,20%	1,28
1.4.2.3.1.3.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	2 Laporan	2	100%	97.976.000	71.111.710	72,58%	1,38



No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan							

Berdasarkan dari hasil tabel perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang perencanaan, Bappeda melakukan efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 83.39 % efisiensi sebesar 1.20.

Faktor – faktor yang mempengaruhi efisiensi sumber daya dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

- Di internal Bappeda secara rutin diadakan rapat koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatann untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- Pengadministrasian dokumen-dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban yang rapi berdampak pada kemudahan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah capaian kinerja sebesar 98.97% dan capaian anggaran sebesar 74.11% efisiensi sebesar 1.34.

Faktor – faktor yang mempengaruhi efisiensi sumber daya dari Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah antara lain:

- Bappeda sebagai penanggung jawab penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk melaksanakan semua tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017;



- Setiap tahapan perencanaan dilaksanakan sesuai dengan timeline yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan;
 - Menyiapkan kamus usulan masyarakat dan pikir sesuai dengan permasalahan dan prioritas pembangunan daerah;
 - Melakukan inisiasi pendampingan pelaksanaan musrenbang kecamatan dengan memberikan pendampingan kepada desa secara intensif tata cara pengisian usulan musrenbang melalui aplikasi SIPD;
 - Melakukan sosialisai kamus usulan dan prosedur usulan pikir di SIPD kepada DRPD;
 - Pada saat penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKPD) diselaraskan dan disinkronkan dengan program yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD);
 - Tahap perencanaan penganggaran menggunakan aplikasi SIPD;
 - Tahap evaluasi menggunakan aplikasi evdoren;
 - Koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat daerah, TAPD dan DPRD
 - Beberapa kegiatan rapat koordinasi di Bappeda dilakukan secara online;
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 71.38 % efisiensi sebesar 1.40.

Faktor – faktor yang mempengaruhi efisiensi sumber daya dari program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain:

- Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah, memiliki tiga bidang sektoral yang menyelenggarakan fungsi koordinator penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Berkaitan dengan tugas dan fungsi tiga bidang sektoral di Bappeda melakukan pendampingan lebih intensif kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan. Pendampingan tahun 2023 yang telah dilakukan antara lain pendampingan penyusunan Renja tahun 2024 dan Perubahan Renja tahun 2023 dengan melakukan proses verifikasi. Pada proses verifikasi tiga bidang sektoral Bappeda memastikan sistematika penyajian dokumen



perencanaan Perangkat Daerah telah sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;

- Penyelarasan atau sinkronisasi program-program dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah telah sesuai dengan Program-program dalam RKPD dan RPJMD melalui proses asistensi Perangkat Daerah dengan Bappeda sesuai dengan sektor Perangkat Daerah;
- Perangkat daerah didorong untuk segera menindak lanjuti hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan;
- Bappeda terus berupaya memberikan edukasi proses perencanaan kepada perangkat daerah, antara lain dengan menyusun schedule perencanaan, sosialisasi aplikasi SIPD, aparatur Bappeda siap memberikan pendampingan dan saran masukan kepada perangkat daerah;
- Beberapa kegiatan rapat koordinasi di Bappeda dilakukan secara online;

BAB IV PENUTUP





BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023. Penyusunan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki satu tujuan dan 3 sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis Bappeda semuanya mencapai target yang telah ditentukan sebagai berikut :
 - Tujuan Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD capaian kinerja sebesar 114.35% (sangat tinggi);
 - Sasara I Tercapainya Akuntabilitas Penunjang Usuran Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase capaian Evaluasi LKJIP capaian kinerja sebesar 117.65% (sangat tinggi);
 - Sasaran II Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi degan indikator Persentase pencapaian pelaksanaan Renja capaian kinerja sebesar 111.20% (sangat tinggi);



- Sasaran III Terpenuhinya Kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah dengan indikator Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah capaian kinerja sebesar 116.89% (sangat tinggi)
- a. Faktor-faktor pendukung tercapainya sasaran startegis Bappeda adalah :
 - Di internal Bappeda secara rutin diadakan rapat koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - Memberikan kesempatan kepada seluruh aparatur untuk meningkatkan kompetensinya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja Bappeda;
 - Pengadministrasian dokumen-dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban keuangan dan pengadministrasian dokumen kepegawaian yang lebih tertata;
 - Bappeda sebagai penanggung jawab penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk melaksanakan semua tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017;
 - Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah, memiliki tiga bidang sektoral yang menyelenggarakan fungsi koordinator penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Berkaitan dengan tugas dan fungsi tiga bidang sektoral di Bappeda melakukan pendampingan lebih intensif kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan. Pendampingan tahun 2023 yang telah dilakukan antara lain pendampingan penyusunan Renja tahun 2024 dan Perubahan Renja tahun 2023 dengan melakukan proses verifikasi. Pada proses verifikasi tiga bidang sektoral Bappeda memastikan sistematika penyajian dokumen perencanaan Perangkat Daerah telah sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;



- Setiap tahapan perencanaan dilaksanakan sesuai dengan timeline yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan;
 - Menyiapkan kamus usulan masyarakat dan pikir sesuai dengan permasalahan dan prioritas pembangunan daerah;
 - Melakukan inisiasi pendampingan pelaksanaan musrenbang kecamatan dengan memberikan pendampingan kepada desa secara intensif tata cara pengisian usulan musrenbang melalui aplikasi SIPD;
 - Melakukan sosialisai kamus usulan dan prosedur usulan pikir di SIPD kepada DRPD;
 - Pada saat penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKPD) diselaraskan dan disinkronkan dengan program yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD);
 - Tahap perencanaan penganggaran menggunakan aplikasi SIPD;
 - Tahap evaluasi menggunakan aplikasi evdoren;
 - Koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat daerah, TAPD dan DPRD.
 - Perangkat daerah didorong untuk segera menindak lanjuti hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan;
 - Bappeda terus berupaya memberikan edukasi proses perencanaan kepada perangkat daerah, antara lain dengan menyusun schedule perencanaan, sosialisasi aplikasi SIPD, aparatur Bappeda siap memberikan pendampingan dan saran masukan kepada perangkat daerah
- b. Kendala-kendala yang dihadapi Bappeda untuk tercapainya tujuan dan sasaran startegis adalah
- Proses penetapan SK PA, Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran yang cukup lama;
 - Barang yang akan diadakan tidak masuk kedalam RKBMD sehingga untuk pengadaan barang menunggu APBD perubahan;
 - Adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan



Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga Perangkat Daerah dengan pendampingan dari Bappeda melakukan pemetaan sub kegiatan yang lama dengan sub kegiatan nomenklatur terbaru pada saat proses penyusunan Renja 2024 sudah berjalan;

- Adanya pembentukan SOTK baru dan penggabungan SOTK sehingga dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam dokumen perencanaan PD;
 - Data-data perencanaan Perangkat Daerah yang tidak konsisten/ kurang valid;
 - Keterbatasan jumlah aparatur dibidang perencanaan baik di Bappeda maupun di PD;
 - Regulasi perencanaan dari pemerintah pusat yang perubahannya cukup dinamis menuntut PD dan Bappeda untuk cepat memahami dan melaksanakan dalam tahapan perencanaan;
 - Padatnya schedule pada setiap tahapan perencanaan;
 - Belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran;
 - Penggunaan SIPD tidak optimal karena tidak konsisten dalam mengeluarkan kebijakan sehingga implementasi di aplikasi SIPD tidak sesuai regulasi perencanaan;
 - Perangkat daerah lambat menyerahkan dokumen untuk di asistensi oleh Bappeda.
2. Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 47.620.941.573 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 37.338.593.596, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 78,41% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 1.46%.
3. Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :



- a. Perbaikan ke depan untuk pencapaian target sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota) adalah :
- Dalam tahapan perencanaan penganggaran Kepala Bidang di Bappeda menyampaikan rencana aksi, target kinerja dan kebutuhan anggaran yang dilengkapi dengan identifikasi pengadaan barang/jasa, menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa dan penyusunan kerangka acuan kerja sub kegiatan yang dipresentasikan/ disampaikan kepada Kepala Bappeda;
 - Lebih intensif melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi realisasi keuangan;
 - Pada saat melakukan perubahan Rencana Kerja (Renja) perlu dilakukan analisis lebih komperhensif terhadap hasil evaluasi pelaksana Renja sebagai dasar untuk pengurangan atau penambahan target kinerja dan pagu anggaran perubahan;
- b. Perbaikan kedepan untuk pencapaian target sasaran startegis terpenuhinya kualitas kendalian dan evaluasi Perencanaan Daerah dan terpenuhinya kesesuaian dokumen perangkat daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah (Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah) adalah :
- Perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang cukup dinamis dan timeline penyusunan dokumen perencanaan yang cukup padat diperlukan penguatan kompetensi verifikator di internal Bappeda agar dapat melakukan pendampingan dengan lebih maksimal dan memberikan rekomendasi yang lebih cepat dan valid;
 - Peningkatan kompetensi aparatur di bidang perencanaan pada Perangkat Daerah sehingga perangkat daerah dapat dengan cepat merespon dan memahami penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah masing-masing;



- Peningkatan koordinasi di internal Bappeda untuk pendalaman dan menyamakan persepsi sebelum pelaksanaan asistensi atau verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah;
- Ekspose di internal Bappeda hasil asistensi atau verifikasi untuk dicermati bersama- sama;
- Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan perangkat daerah, TAPD dan DPRD;

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Sangatta, 26 Januari 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NOVIARI NOOR, ST., MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pusat Perkantoran Kawasan Bukit Pelangi
Jalan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH No. 01 Kode Pos 75611
Telp. (0549) 23770 Fax : (0549) 2026222 Website : Bappeda.kutaitimur.go.id
SANGATTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. Noviari Noor, ST., MT.**
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 19671108 200212 1 004
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si.**
Jabatan : Bupati Kutai Timur

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, Januari 2023

Pihak Kedua
Bupati Kutai Timur

Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si.

Pihak Pertama,
Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

H. Noviari Noor, ST., MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penunjang Pemerintahan Daerah.	Persentase Capaian Evaluasi LKjIP	85%
2	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah.	Persentase Pencapaian Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah	89%
3	Terpenuhinya Kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah.	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	85.55%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	22,200,925,964	PAD
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	9,550,000,000	PAD
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	5,850,000,000	PAD
TOTAL PROGRAM BAPPEDA KAB. KUTAI TIMUR 2023 :		37,600,925,964	

Sangatta, Januari 2023

Pihak Kedua,
Bupati

Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si.

Pihak Pertama,
Kepala Bappeda

H. Noviari Noor, ST., MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pusat Perkantoran Kawasan Bukit Pelangi
Jalan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH No. 01 Kode Pos 75611
Telp. (0549) 23770 Fax : (0549) 2026222 Website : Bappeda.kutaitimur.go.id
SANGATTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Idham Cholid, M.Pd.**
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
NIP : 19690314 199802 1 005
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. Noviari Noor, ST., MT.**
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 19671108 200212 1 004
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, Februari 2023

Pihak Kedua
Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur



H. Noviari Noor, ST., MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

Pihak Pertama,
Sekretaris Bappeda Kab. Kutai Timur



Idham Cholid, M.Pd.
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19690314 199802 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	100%
2	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorer serta Laporan Keuangan	Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorer serta Laporan Keuangan	100%
3	Terpenuhinya Pencatatan Aset Daerah yang dikelola oleh SKPD	Dokumen Laporan Pencatatan Aset Daerah yang dikelola	20%
4	Terpenuhinya Jumlah Kebutuhan Pegawai SKPD	Dokumen Laporan Kepegawaian SKPD	100%
5	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	Dokumen Laporan Hasil Kegiatan	100%
6	Tersedianya Kebutuhan Penunjang Operasional Kantor	Dokumen Laporan Hasil Kegiatan	100%
7	Tertelaksananya Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,150,000,000	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,350,925,964	
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	175,000,000	
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	830,000,000	
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,000,000,000	
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450,000,000	
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,245,000,000	


Sangatta, Februari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda



H. Noviari Noor, ST., MT.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19671108 200212 1 004

Pihak Pertama,
Sekretaris



Idham Cholid, M.Pd.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690314 199802 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sugiyono, S. Hut., MP
Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP : 19730313 199403 1 006
Jabatan : Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**



Nama : Noviari Noor, ST., MT
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 19671108 200212 1 004
Jabatan : Kepala Bappeda
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjut disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami pihak pertama.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda,



Noviari Noor, ST., MT
NIP. 19671108 200212 1 004

Pihak Pertama,
Kabid. Infrastruktur dan
Kewilayahan,


Sugiyono, S. Hut., MP
NIP. 19730313 199403 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD dibidang Infrastruktur dan Kewilayahan	6 Dokumen

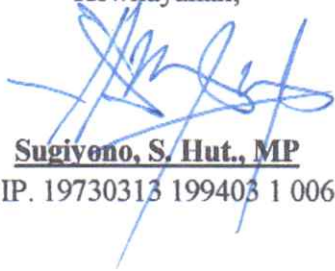
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2.300.000.000,-	APBD

Sangatta, Februari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda


Noviari Noor, ST., MT
NIP. 19671108 200212 1 004

Pihak Pertama,
Kabid. Infrastruktur dan
Kewilayahan,


Sugiyono, S. Hut., MP
NIP. 19730313 199403 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pusat Perkantoran Kawasan Bukit Pelangi
Jalan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH No. 01 Kode Pos 75611
Telp. (0549) 23770 Fax : (0549) 2026222 Website : Bappeda.kutaitimur.go.id
SANGATTA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. Syaiful, S.Sos**
Pangkat : Penata TK.I (III/d)
NIP : 19690101 200212 1 015
Jabatan : Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Noviari Noor, S.T.,MT**
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 19671108 200212 1 004
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, Februari 2023



Pihak Kedua,
Kepala Badan

Noviari Noor, S.T.,MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

Pihak Pertama,
Kabid Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia

M.Syaiful, S.Sos
Penata TK. I (III/d)
NIP. 19690101 200212 1 015



PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2023
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR

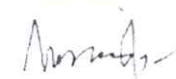
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.700.000.000	

Sangatta, Februari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan,

Noviari Noor, S.T.,MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

Pihak Pertama,
Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia,

M. Syaiful, S.Sos
Penata TK.I (III/d)
NIP. 19690101 200212 1 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Marhadyn, SKM., MPH**

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Noviari Noor, ST., MT**

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kutai Timur
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami .

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda



Noviari Noor, ST., MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Marhadyn, SKM., MPH
Pembina (IV/a)
NIP. 19780328 200012 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	11 Dokumen
		Jumlah Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Daerah	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	6 Laporan
		Jumlah Implementasi SIPD pada Penyusunan Perencanaan Daerah	3 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.500.000.000	PAD
2.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.300.000.000	PAD
3.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.250.000.000	PAD
4.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1.500.000.000	PAD
TOTAL SUB KEGIATAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		9.550.000.000	PAD

Sangatta, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda

Noviari Noor, ST., MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pengkajian,
Pengendalian dan Pelaporan

Marhadyn, SKM., MPH
Pembina (IV/a)
NIP. 19780328 200012 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Mitha Ferdina, S.Sos.,M.Si**
Pangkat/Gol : Penata / III.c
NIP : 19870224 201101 2 017
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Noviari Noor, S.T.,M.T**
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 19671108 200212 1 004
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kutai Timur

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama
Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

Pihak Kedua
Kepala,

Noviari Noor, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004


Mitha Ferdina, S.Sos.,M.Si.
Penata (III/c)
NIP. 19870224 201101 2 017

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR**

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
2.	Tersedianya laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
3	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5 Paket
4.	Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen
5	Terlaksananya orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan peundang-undang	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	46 Orang
6	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan	15 Paket
7.	Terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket
8.	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 Paket
9.	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	25 Paket
10.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket
11.	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 Laporan
12.	Tersedianya dokumen penatausahaan arsip dinamis	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen
13.	Tersedianya jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5 Laporan
14.	Terbayarkannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	6 Laporan
15.	Terbayarkannya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan
16	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	52 Unit
17	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7 Unit
18	Terlaksananya perjanjian kontrak pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	4 Unit

19	Terlaksananya perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen
20	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan
21	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan Dokumen laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
22	Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan Dokumen laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
23	Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
24	Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
25	Tersedianya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan
26	Terbayarkannya ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	64 orang/bulan
27	Tersedianya dokumen peyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil peyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen
28	Tersedianya dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	5000 Dokumen
29	Tersedianya dokumen koordinasi dan terlaksana akutansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD	6 Dokumen
30	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 Laporan
31	Tersedianya dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	672 Dokumen
32	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	4 Laporan

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	90.000.000	
2.	Penata usahaan barang milik daerah pada SKPD	85.000.000	
3.	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	230.000.000	
4.	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	50.000.000	
5	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	550.000.000	
6.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100.000.000	
7.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	505.000.000	
8.	Penyediaan peralatan rumah tangga	50.000.000	
9.	Penyediaan bahan logistik kantor	200.000.000	
10.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000	
11.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1.045.000.000	
12.	Penata usahaan arsip dinamis pada SKPD	50.000.000	
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000	
14.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.000.000	
15.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	300.000.000	
16.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	500.000.000	
17.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	150.000.000	
18.	Pemelihara / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3.595.000.000	
19	Penyusun dokumen perencanaan perangkat daerah	550.000.000	
20	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	150.000.000	
21	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	75.000.000	
22	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	50.000.000	

23	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	75.000.000	
24	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	50.000.000	
25	Evaluasi kinerja perangkat daerah	200.000.000	
26	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	11.034.470.868	
27	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1.216.455.096	
28	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	750.000.000	
29	Koordinasi dan pelaksana akuntansi SKPD	100.000.000	
30	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	100.000.000	
31	Pengelola dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	50.000.000	
32	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	100.000.000	


Sangatta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala



Noviari Noor, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

Pihak Pertama
Kasubbag Umum dan Kepegawaian,



Mitha Ferdina, S.Sos., M.Si.
Penata (III c)
NIP. 19870224 201101 2 017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Mitha Ferdina, S.Sos.,M.Si**
Pangkat/Gol : Penata / III.c
NIP : 19870224 201101 2 017
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Idham Cholid, M.Pd**
Pangkat/Gol : Pembina TK I / IV.b
NIP : 19690314 199802 1 005
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kutai Timur

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Januari 2023

Pihak Pertama
Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

Mitha Ferdina, S.Sos.,M.Si.
Penata (III/c)
NIP. 19870224 201101 2 017

Pihak Kedua
Sekretaris,
Idham Cholid, M.Pd.
PembinaTK. I (IV/b)
NIP. 19690314 199802 1 005

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR**

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
2.	Tersedianya laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
3	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5 Paket
4.	Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen
5	Terlaksananya orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan peundang-undang	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	46 Orang
6	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan	15 Paket
7.	Terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket
8.	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 Paket
9.	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	25 Paket
10.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket
11.	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 Laporan
12.	Tersedianya dokumen penatausahaan arsip dinamis	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen
13.	Tersedianya jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5 Laporan
14.	Terbayarkannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	6 Laporan
15.	Terbayarkannya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan
16	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	52 Unit
17	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7 Unit
18	Terlaksananya perjanjian kontrak pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	4 Unit


No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	90.000.000	
2.	Penata usahaan barang milik daerah pada SKPD	85.000.000	
3.	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	230.000.000	
4.	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	50.000.000	
5.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	550.000.000	
6.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100.000.000	
7.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	505.000.000	
8.	Penyediaan peralatan rumah tangga	50.000.000	
9.	Penyediaan bahan logistik kantor	200.000.000	
10.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000	
11.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1.045.000.000	
12.	Penata usahaan arsip dinamis pada SKPD	50.000.000	
13.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000	
14.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.000.000	
15.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	300.000.000	
16.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	500.000.000	
17.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	150.000.000	
18.	Pemelihara / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3.595.000.000	

Sangatta, 27 Januari 2023

Pihak Kedua
Sekretaris,

Idham Cholid, M.Pd
PembinaTK. I (IV/b)
NIP. 19690314 199802 1 005

Pihak Pertama
Kasubbag Umum dan Kepegawaian,


Mitha Ferdina, S.Sos., M.Si.
Penata (III c)
NIP. 19870224 201101 2 017



PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV TAHUN 2023
SUB BAGIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah :

Nama : Rifianti, SE., MM
NIP : 19820120 201001 2 006
Jabatan : Kasubbag. Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Idham Cholid, M.Pd
NIP : 19690314 199802 1 005

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris,

Idham Cholid, M.Pd
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690314 199802 1 005

Pihak Pertama,
Kasubbag. Keuangan


Rifianti, SE., MM
Penata (III/d)
NIP. 19820120 201001 2 006



PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2023
SUB. BAGIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR


NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang / 12 Bulan
2	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
3	Terlaksanannya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000 Dokumen
4	Terlaksanannya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 Dokumen
5	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan
6	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6. Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	672 Dokumen
7	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	7. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	4 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 11.034.470.868,-	APBD
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 1.216.455.096,-	APBD
3.	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 750.000.000,-	APBD
4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 100.000.000,-	APBD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 100.000.000,-	APBD
6.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp. 50.000.000,-	APBD
7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Rp. 100.000.000,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 13.350.925.964,-	

Sangatta, 3 Januari 2023

Pihak Kedua
Sekretaris

Idham Cholid, M.Pd
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690314 199802 1 005

Pihak Pertama,
Kasubbag. Keuangan

Rifianti, SE., MM
Penata (III/d)
NIP. 19820120 201001 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ripto Widargo, S. TP., MT**
Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP : 19721219 200003 1 002
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**


Nama : **Noviari Noor, ST., MT.**
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 19671108 200212 1 004
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan,

Noviari Noor, ST., MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perekonomian dan
Sumber Daya Alam,

Ripto Widargo, S. TP., MT.
Pembina (IV/a)
NIP. 19721219 200003 1 002



PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUTAI TIMUR

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD dibidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.	1. Tersusunnya perencanaan program kegiatan di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.	1 Dokumen
		2. Tersusunnya perumusan kebijakan dalam bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.	1 Dokumen
		3. Terlaksananya koordinasi kegiatan dalam bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.	1 Laporan
		4. Terkoordinirnya pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota.	1 Laporan
		5. Terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD & RKPD).	1 Dokumen
		6. Terkoordinirnya penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.	11 SKPD
		7. Terkoordinirnya pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD).	3 Dokumen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		8. Terkoordinirnya pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD.	1 Dokumen
		9. Terkoordinirnya pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD.	1 Dokumen
		10. Terkoordinirnya sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten.	11 SKPD
		11. Terkoordinirnya dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional.	1 Dokumen
		12. Terkoordinirnya pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten.	1 Dokumen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.850.000.000,-	

Sangatta,

2023

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda,



Noviari Noor, ST., MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671108 200212 1 004

Pihak Pertama,
Kabid. Perekonomian dan
Sumber Daya Alam,



Ripto Widargo, S.TP., MT.
Pembina (IV/a)
NIP. 19721219 200003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pusat Perkantoran Kawasan Bukit Pelangi
Jalan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH No. 01 Kode Pos 75611
Telp. (0549) 23770 Fax : (0549) 2026222 Website : Bappeda.kutaitimur.go.id
SANGATTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Noviari Noor, ST., MT.**
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 19671108 200212 1 004
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si.**
Jabatan : Bupati Kutai Timur

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 26 September 2023

Pihak Kedua
Bupati Kutai Timur

Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si.

Pihak Pertama,
Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Noviari Noor, ST., MT.
NIP. 19671108 200212 1004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penunjang Pemerintahan Daerah.	Persentase Capaian Evaluasi LKjIP	85%
2	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah.	Persentase Pencapaian Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah	89%
3	Terpenuhinya Kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah.	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	85,55%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	25.430.057.873	PAD
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	10.750.000.000	PAD
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	11.440.883.700	PAD
TOTAL PROGRAM BAPPEDA KAB. KUTAI TIMUR 2023 :		47.620.941.573	

Sangatta, 26 September 2023

Pihak Kedua,
Bupati

Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si.

Pihak Pertama,
Kepala Bappeda

Noviari Noor, ST., MT.
NIP. 19671108 200212 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pusat Perkantoran Kawasan Bukit Pelangi
Jalan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH No. 01 Kode Pos 75611
Telp. (0549) 23770 Fax : (0549) 2026222 Website : Bappeda.kutaitimur.go.id
SANGATTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Idham Cholid, M.Pd.**
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
NIP : 19690314 199802 1 005
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Noviari Noor, ST., MT.**
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 19671108 200212 1 004
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 26 September 2023

Pihak Kedua
Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Pihak Pertama,
Sekretaris Bappeda Kab. Kutai Timur

H. Noviari Noor, ST., MT.
NIP. 19671108 200212 1 004

Idham Cholid, M.Pd.
NIP. 19690314 199802 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun	100%
2	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorer serta Laporan Keuangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorer serta Laporan Keuangan	100%
3	Tersedianya Dokumen Pencatatan Aset Daerah yang dikelola oleh SKPD	Terpenuhinya Pencatatan Aset Daerah yang dikelola oleh SKPD	100%
4	Terpenuhinya Jumlah Kebutuhan Pegawai SKPD	Terpenuhinya Jumlah Kebutuhan Pegawai SKPD	100%
5	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%
6	Tersedianya Dokumen Laporan Penunjang Operasional Kantor	Dokumen Laporan Hasil Kegiatan	100%
7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Laporan Hasil Kegiatan	100%

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	765.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.565.057.873	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	79.000.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.075.000.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.249.500.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	451.500.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.245.000.000	

Sanggata, 26 September 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda

H. Noviani Noor, ST., MT.
NIP. 19671108 200212 1 004

Pihak Pertama,
Sekretaris

Idham Cholid, M.Pd.
NIP. 19690314 199802 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pusat Perkantoran Kawasan Bukit Pelangi
Jalan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH No. 01 Kode Pos 75611
Telp. (0549) 23770 Fax : (0549) 2026222 Website : Bappeda.kutaitimur.go.id
SANGATTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Rifianti, SE., MM.**
Pangkat : Penata TK.I (III/d)
NIP : 19820120 201001 2 006
Jabatan : Kasubag Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Idham Cholid, M.Pd.**
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
NIP : 19690314 199802 1 005
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 26 September 2023

Pihak Kedua
Sekretaris Bappeda Kab. Kutai Timur

Idham Cholid, M.Pd.
NIP. 19690314 199802 1 005

Pihak Pertama,
Kasubbag. Keuangan

Rifianti, SE., MM.
NIP. 19820120 201001 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
2	Tersedianya Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
3	Tersedianya Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
4	Tersedianya Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5	Tersedianya Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
6	Tersedianya Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kiinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kiinerja SKPD	1 Laporan
7	Tersedianya Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
8	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/Bulan
9	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Aministrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
10	Tertaksananya Pentausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	50000 Dokumen
11	Tertaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 Dokumen
12	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan
13	Tersedianyan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	672 Dokumen
14	Tersedianya Laporan Leuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Laporan

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	398.509.533	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	43.783.759	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50.669.042	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	31.576.300	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	108.871.949	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.589.417	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.377.375.229	
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.902.682.644	
10	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	935.000.000	
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100.000.000	
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.000.000	
13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	50.000.000	
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	100.000.000	

Sangatta, 26 September 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris,



Idham Cholid, M.Pd.
NIP. 19690314 199802 1 005

Pihak Pertama,
Kasubag. Keuangan



Rifianti, SE., MM.
NIP. 19820120 201001 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pusat Perkantoran Kawasan Bukit Pelangi
Jalan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH No. 01 Kode Pos 75611
Telp. (0549) 23770 Fax : (0549) 2026222 Website : Bappeda.kutaitimur.go.id
SANGATTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Mitha Ferdina, S.Sos., M.Si.**
Pangkat : Penata (III/c)
NIP : 19870224 201101 2 017
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Idham Cholid, M.Pd.**
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
NIP : 19690314 199802 1 005
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 26 September 2023

Pihak Kedua
Sekretaris Bappeda Kab. Kutai Timur

Pihak Pertama,
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Idham Cholid, M.Pd.
NIP. 19690314 199802 1 005

Mitha Ferdina, S.Sos., M.Si.
NIP. 19870224 201101 2 017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
2	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
3	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket
4	Terlaksananya Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen
5	Terlaksananya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang
6	Terlaksananya Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	113 Orang
7	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	15 Paket
8	Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket
9	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket
10	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket
11	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket
12	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan
13	Tersedianya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
14	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan
15	Terbayarkannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan
16	Terbayarkannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan
17	Terlaksananya Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit
18	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit
19	Terlaksananya Perjanjian Kontrak Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Milik Daerah SKPD	11.500.000	
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	67.500.000	
3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	300.000.000	
4	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.000.000	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000	
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.550.000.000	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	544.500.000	
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.000.000	
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	350.000.000	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.045.000.000	
13	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000	
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85.000.000	
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	266.500.000	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000	
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.595.000.000	

Sangatta, 26 September 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris



Idham Cholid, M.Pd.
NIP. 19690314 199802 1 005

Pihak Pertama,
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian



Mitha Ferdina, S.Sos., M.Si.
NIP. 19870224 201101 2 017



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pusat Perkantoran Kawasan Bukit Pelangi
Jalan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH No. 01 Kode Pos 75611
Telp. (0549) 23770 Fax : (0549) 2026222 Website : Bappeda.kutaitimur.go.id
SANGATTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Marhadyn, SKM, MPH.**
Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP : 19780328 200012 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Noviari Noor, ST., MT.**
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 19671108 200212 1 004
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai
Timur

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 26 September 2023

Pihak Kedua
Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Noviari Noor, ST., MT.
NIP. 19671108 200212 1 004

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Marhadyn, SKM., MPH.
NIP. 19780328 200012 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	2 Dokumen
		Terpenuhinya data dan informasi Pemerintahan Daerah dalam rangka penyusunan perencanaan daerah	56 OPD
		Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah	5 Dokumen
		Terlaksananya Implementasi SIPD pada Penyusunan Perencanaan Daerah	56 OPD

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.278.911.615	
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.685.691.137	
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.196.732.262	
4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2.588.664.986	

Sangatta, 26 September 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda

Noviani Noor, ST., MT.
NIP. 19671108 200212 1 004

Pihak Pertama,
Kepala Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah

Marhadyn, SKM., MPH.
NIP. 19780328 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pusat Perkantoran Kawasan Bukit Pelangi
Jalan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH No. 01 Kode Pos 75611
Telp. (0549) 23770 Fax : (0549) 2026222 Website : Bappeda.kutaitimur.go.id
SANGATTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Sugiyono, S.Hut., MP.**
Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP : 19730313 199403 1 006
Jabatan : Kepala Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Noviari Noor, ST., MT.**
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 19671108 200212 1 004
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 26 September 2023

Pihak Kedua
Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Noviari Noor, ST., MT.
NIP. 19671108 200212 1 004

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Insfrastruktur
dan Kewilayahan

Sugiyono, S.Hut., MP.
NIP. 19730313 199403 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	6.629.883.700	

Sangatta, 26 September 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda

Noviani Noor, ST., MT.
NIP. 19671108 200212 1 004

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan

Sugiyono, S.Hut., MP.
NIP. 19730313 199403 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pusat Perkantoran Kawasan Bukit Pelangi
Jalan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH No. 01 Kode Pos 75611
Telp. (0549) 23770 Fax : (0549) 2026222 Website : Bappeda.kutaitimur.go.id
SANGATTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ripto Widargo, S.TP., MT.**
Pangkat : Penata (IV/a)
NIP : 19721219 200003 1 002
Jabatan : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Noviari Noor, ST., MT.**
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 19671108 200212 1 004
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 26 September 2023

Pihak Kedua
Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Noviari Noor, ST., MT.
NIP. 19671108 200212 1 004

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perekonomian
dan Sumber Daya Alam

Ripto Widargo, S.TP., MT.
NIP. 19721219 200003 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD di Bidang Perekonomian dan SDA	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Perekonomian dan SDA	100%

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2.616.000.000	

Sangatta, 26 September 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda

Noviani Noor, ST., MT.
NIP. 19671108 200212 1 004

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber
Daya Alam

Ripto Widatopo, S.TP., MT.
NIP. 19721219 200003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pusat Perkantoran Kawasan Bukit Pelangi
Jalan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH No. 01 Kode Pos 75611
Telp. (0549) 23770 Fax : (0549) 2026222 Website : Bappeda.kutaitimur.go.id
SANGATTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. Syaiful, S.Sos.**
Pangkat : Penata TK. I (III/d)
NIP : 19690101 200212 1 015
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Noviari Noor, ST., MT.**
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 19671108 200212 1 004
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 26 September 2023

Pihak Kedua
Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

Noviari Noor, ST., MT.
NIP. 19671108 200212 1 004

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia

M. Syaiful, S.Sos.
NIP. 19690101 200212 1 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pembangunan Manusia	100%

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2.195.000.000	

Sangatta, 26 September 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda

Noviari Noor, ST., MT.
NIP. 19671108 200212 1 004

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia

M. Syaiful, S.Sos.
NIP. 19690314 199802 1 005

Indikator	Target Awal	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Status
[OPD] 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
[URUSAN] PERENCANAAN								
[TUJUAN] Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah.								
Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	84.55%	85.55%	86.55%	87.00%	90.00%	100.00%	100.00%	

Indikator	Target Awal	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Status	
[OPD] 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									
[URUSAN] PERENCANAAN									
[TUJUAN] Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah.									
[SASARAN] Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah									
Persentase capaian evaluasi LAKIP	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%		
[SASARAN] Terpenuhinya kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap dokumen Perencanaan Daerah									
Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	83.55%	84.55%	85.55%	90.00%	95.00%	100.00%	100.00%		
[SASARAN] Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah									
Persentase pencapaian pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah	80%	87%	89%	91%	95%	100%	100%		

Indikator	Target Awal	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2022	Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	
[OPD] 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan													
[URUSAN] PERENCANAAN													
[TUJUAN] Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah.													
[SASARAN] Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah													
[PROGRAM] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	
[SASARAN] Terpenuhinya kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap dokumen Perencanaan Daerah													
[PROGRAM] PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH													
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD kedalam Renstra dan Renja OPD	100%	85%	87%	90%	90%	100%	100%	0	0	0	0	0	
[SASARAN] Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah													
[PROGRAM] PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH													
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	85.55	85.55	86.55	90	95	100	100	0	0	0	0	0	

Indikator	Target Awal	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2022	Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	
[OPD] 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													
[URUSAN] NON URUSAN													
[TUJUAN] Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah.													
[SASARAN] Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah													
[PROGRAM] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
[KEGIATAN] Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													
Terpenuhinya pencatatan aset daerah yang dikelola oleh SKPD	100%	20%	20%	20%	20%	10%	100%	76,000,000	87,000,000	150,000,000	76,000,000	100,000,000	
[KEGIATAN] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
Terpenuhinya Jumlah kebutuhan Pegawai SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	650,000,000	650,000,000	650,000,000	650,000,000	650,000,000	
[KEGIATAN] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorer serta laporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	13,300,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	
[KEGIATAN] Administrasi Umum Perangkat Daerah													
tersedianya kebutuhan Rumah tangga SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,460,000,000	1,460,000,000	2,460,000,000	1,460,000,000	1,500,000,000	
[KEGIATAN] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,550,000,000	1,550,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	1,500,000,000	
[KEGIATAN] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													

Indikator	Target Awal	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2022	Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	
Jumlah kendaraan dinas operasional/apangan	0%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0	1,000,000,000	0	1,600,000,000	2,000,000,000	
[KEGIATAN] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Tersedianya kebutuhan penunjang operasional kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	935,000,000	935,000,000	1,300,000,000	935,000,000	1,000,000,000	
[KEGIATAN] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	550,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	
[URUSAN] PERENCANAAN													
[TUJUAN] Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah.													
[SASARAN] Terpenuhinya kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap dokumen Perencanaan Daerah													
[PROGRAM] PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH													
[KEGIATAN] Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan													
tersusunya dokumen perencanaan OPD dibidang infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,100,000,000	4,100,000,000	4,100,000,000	4,100,000,000	4,100,000,000	
[KEGIATAN] Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia													
Tersusunnya dokumen perencanaan OPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,290,000,000	2,399,000,000	2,500,000,000	2,603,000,000	2,708,000,000	

Indikator	Target Awal	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target Akhir	Pagu 2022	Pagu 2023	Pagu 2024	Pagu 2025	Pagu 2026	
[KEGIATAN] Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)													
Tersusunnya dokumen perencanaan OPD dibidang Perekonomian dan SDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,700,000,000	3,700,000,000	3,700,000,000	3,700,000,000	3,700,000,000	
[SASARAN] Terpenuhiya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah													
[PROGRAM] PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH													
[KEGIATAN] Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah													
Tersusunnya Dokumen bahan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,000,000,000	1,200,000,000	1,500,000,000	1,719,000,000	2,000,000,000	
[KEGIATAN] Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah													
Dokumen LKjIP dan LKPJ	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,519,000,000	1,500,000,000	
[KEGIATAN] Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan													
Tersusunnya dokumen Musrenbang dan Dokumen RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,400,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	